

## **BAB V** **KESIMPULAN**

Paul Keating, pada usia 12 tahun, sudah mulai bekerja dengan Partai Buruh sebagai penyebar pamflet. Sikap politik ini sudah ditanamkan ayahnya sejak dini. Ayahnya juga salah seorang yang lebih percaya bahwa sukses bisa diraih dengan kerja keras ketimbang lewat pendidikan tinggi. Paul Keating sendiri masuk sekolah Katolik La Salle College hingga berusia 15 tahun, Paul Keating sudah sering bekerja di toko mencari uang pada masa liburan sekolah.

Paul Keating yang saat itu masih muda tentu saja tak menyembunyikan sifat remajanya. Ia kagum pada mobil dan musik rock 'n' roll. Pada saat itu pula Keating dikenal sebagai anak muda yang selalu perlente. Ia selalu mengenakan setelan jas rapi, rambutnya tersisir rapi dan sepatunya disemir mengkilat. ketika sudah menjadi politikus terkenal, setiap kali diwawancara televisi, Keating selalu membawa beberapa setel jas. Ia bersikeras untuk mengadakan tes di depan kamera untuk menentukan jas mana yang paling cocok dikenakan di televisi.

Ketika berusia 18 tahun, Keating bergabung dengan *Labor Youth Council* (Dewan Pemuda Partai Buruh). Melalui LYC, Keating belajar berargumentasi politik, mengenal berbagai masalah ekonomi dan politik. Partai Buruh saat itu melihat LYC sebagai wadah kaderisasi politikusnya. Pada tahun 1965, Paul Keating bekerja di berbagai perusahaan asing dan ketika berusia 21 tahun, kehidupannya mulai diabdikan sepenuhnya untuk politik. Ia mendaftarkan diri dalam praseleksi parlemen

federal dan seleksi itu dilaluinya dengan mudah. Pada usia 25 tahun, Keating menjadi anggota termuda di parlemen negara bagian New South Wales. Tahun pertama bagi Paul Keating, adalah tahun untuk mencari dan mengenal parlemen. Bahasa dan kata-katanya sering mengejutkan lawan politiknya. Perdebatan di parlemen sering diakhiri dengan kemenangan Keating. Dan karier politiknya melesat dengan cepat ketika ia meraih jabatan ketua Partai Buruh cabang New South Wales tahun 1979. Walau usia masih muda, Keating dianggap sebagai politikus yang konservatif.

Paul Keating pernah melontarkan keprihatinannya atas wanita yang harus bekerja di luar rumah untuk menambah nafkah suaminya. Paul Keating bercita-cita untuk memperbaiki keadaan ini. Seorang wanita, katanya, seharusnya seorang istri, tak perlu bekerja di luar rumah. Cita-citanya itu diterapkan di keluarganya. Australia pada pemilu sebelumnya, kemenangan seorang kandidat PM ditentukan oleh citra pribadinya yaitu kekuahan partai dan taktik kampanye.

Rakyat Australia akan menentukan pilihannya atas dasar kuat atau lemahnya pribadi calon pemimpin mereka serta kinerja partai baik dari segi pemerintahan maupun oposisi. Dilihat dari sisi pemerintahan di pemerintahan, adanya kelemahan Partai Buruh adalah ia berkuasa selama 13 tahun. Rakyat Australia biasanya akan mengganti pemerintah yang telah lama berkuasa serta akan menggantinya dengan yang baru. Partai Buruh di dukung oleh para ahli setrategi kampanye serta kukuhnya dua serangkai, Paul Keating, Deputi PM Kim Beazley yang merupakan pemenang tim. Paul Keating seseorang yang berasal dari Sydney ia menjadi anggota perlemen

lebih dari 25 tahun. Paul Keating adalah anak dari golongan pekerja, tetapi ia lebih memahami kelompok berpendapatan rendah dan kesulitan hidup rakyat Australia yang berada di daerah kumuh perkotaan. Keunggulan Paul Keating, yaitu menjadi anggota parlemen mewakili Blaxland pada tahun 1969.

Paul Keating pertama kali menjadi Bendahara negara pada tahun 1983 di usia 39 tahun. Kekuatan Paul Keating sebelum menjadi PM, ia adalah Bendahara Negara masa pemerintahan Bob Hawke tahun 1983-1991 yang memiliki visi jauh kedepan. Dan terlihat dari upaya Pemerintah Buruh untuk menswastakan perusahaan-perusahaan Negara seperti Telkom dan Qantas yang melakukan deregulasi ekonomi sektor perbankan.

Ekonomi Australia mengintegrasikan ekonomi Australia dengan ekonomi Asia yang berkembang pesat, serta menciptakan kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Paul Keating juga berada di belakang kebijakan *The Accord* dan *The Accord Mark II*, yaitu pengaturan penentuan gaji atau upah minimum para pekerja yang telah diatur antara pengusaha dan serikat buruh. Pengaturan yang di berlakukan ini ditentukan oleh dasar pengalaman kerja dan tingkat pendidikan para buruh, apakah mereka itu *Blue Colour* (Buruh Kasar) atau *White Colour* (Buruh Berdasir). Sebagai Perdana Menteri Paul Keating merupakan ekonom yang dibesarkan oleh pengalaman serta berkarir dalam berbagai organisasi buruh dan pemerintahan.

Paul keating berupaya keras memperkuat ekonomi Australia dalam menyongsong perdagangan bebas Asia Pasifik pada 2020. Keunggulan sosok pribadi yang dimiliki oleh Paul Keating juga ditunjang oleh keadaan ekonomi Australia saat ini lebih baik dari pada pemilu pada tahun 1993. Sebagai contoh pada saat pemilu 1993, angka pengangguran mencapai 11,3%, sedangkan saat ini hanya 8,6%. Pertumbuhan ekonomi pada 1995 mencapai 3,5% sedangkan inflansi hanya sekitar 5%.

Hal utama yang sangat membuat malu Pemerintah Buruh adalah adanya deficit neraca yang berjalan sekitar 1,48 miliar dollar Amerika serta hutang liar negeri sebanyak 121,8 miliar dollar. Paul Keating bukan saja seorang ekonom, tetapi juga seorang Diplomat yang unggul dalam meningkatkan citra Australia di Asia. Paul Keating berhasil meluluhkan hati para pemimpin ASEAN, yang pada khususnya dalam mempererat hubungan pribadinya dengan Presiden Soeharto yang mengakibatkan segala persoalan yang menyangkut hubungan bilateral Australia-Indonesia bisa diselesaikan secara baik, seperti soal pengangkatan Dubes RI, masalah HAM di Indonesia dan masalah Timor-Timur.

John Winston Howard lahir di Sydney, Australia, 26 Juli 1939. Ia adalah Perdana Menteri Australia sejak 11 Maret 1996 hingga 3 Desember 2007. Ia adalah perdana menteri terlama kedua Australia setelah Sir Robert Menzies. Howard juga adalah pemimpin Partai Liberal sejak tahun 1995 hingga 2007. Ia kalah dalam pemilu 2007 yang diadakan pada 24 November sehingga harus melepaskan jabatannya.

Howard dilahirkan di Sydney dan mengikuti sekolah di Earlwood Primary and Canterbury Boys' High. Ia meneruskan ke Universitas Sydney dan lulus Sarjana Hukum pada 1961. Ia dibesarkan di daerah Earlwood, suatu daerah kelas menengah yang penduduknya hampir semua merupakan keturunan Anglo-Saxon. Ayahnya mempunyai bengkel mobil dan mendapatkan penghasilan memadai. Ia dibesarkan tanpa banyak kontak dengan masyarakat imigran Australia maupun yang miskin.

John Howard dibesarkan di Australia tahun 1940-1950, permusuhan antara kelompok gereja Katholik dan Protestan gencar. Mereka yang beragama Katolik adalah orang Australia keturunan Irlandia dan mendukung Irlandia dalam konflik Irlandia-Inggris. Pada masa-masa itu kelas menengah Australia kebanyakan beragama Protestan. Kelas pekerja dan yang miskin kebanyakan beragama Katolik. Untuk keluarga Howard, kehidupan sosial mereka berpusat pada Gereja Methodist Earlwood.

Howard datang dari keluarga pro-Protestan dan sangat membenci kelompok Katolik. Mona yang sangat konservatif tetapi memperlihatkan toleransi kepada pihak komunis meskipun sangat tidak menyetujui paham tersebut. Meski demikian, toleransi tidak sampai pada orang Katholik. Seperti banyak wanita Protestan waktu itu yang bersifat sangat prasangka (*prejudice*). John Howard adalah putra bungsu dan orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Mona (ibunya). Pengaruh Mona sangat dominan dalam kehidupannya terlebih ketika ia baru berusia 16 tahun ketika ayahnya meninggal. John Howard di Amerika Serikat pada tahun 1997 Ia aktif

dengan Partai Liberal sejak usia 18 tahun saat mengikuti Gerakan Liberal Muda dan ikut dalam mahasiswa politik di perguruan tinggi. Pada Juli 1962, ia diterima sebagai Jaksa Agung Muda Mahkamah Agung New South Wales. Sebelum pemilihannya ke Parlemen, ia merupakan seorang rekanan di sebuah perusahaan pendanaan di Sydney.

John Howard menjadi orang ke-25 yang memegang jabatan Perdana Menteri sejak terbentuknya Federasi Australia. Ini menyusul kemenangan pemilihan Federal yang menentukan pada 2 Maret 1996. Ia mewakili daerah pemilihan federal Bennelong di pinggiran kota barat laut dan telah terpilih sebagai anggota parlemen Bennelong dalam setiap pemilihan federal sejak 1974. Ia menjadi perdana menteri dengan pengalaman tinggi yang luas dalam pemerintahan dan oposisi. Ia dipilih sebagai Menteri Urusan Bisnis dan Konsumen pada 1975 pada usia 36 tahun dan kemudian menjabat sebagai Menteri Negosiasi Perdagangan Spesial dan sebagai Bendaharawan Persemakmuran selama lebih dari 5 tahun.

Pada September 1985, ia menjabat Wakil Pemimpin yang dipilih koleganya sebagai Pemimpin Partai Liberal Parlementer dan Pemimpin Oposisi sampai Mei 1989. Ia kembali ke kepemimpinan dengan suara bulat koleganya pada 30 Januari 1995. Di masa sementara, ia menjabat sebagai juru bicara Koalisi untuk sejumlah jabatan senior. Terpilih sebagai perdana menteri untuk pertama kalinya pada 1996, ia terpilih kembali pada pemilu 1998, 2001, dan 2004. Ia maju kembali pada pemilu tahun 2007 namun partainya dikalahkan Partai Buruh. Howard sendiri bahkan kalah di daerah pemilihannya, Benelong.

Sebagai negara yang secara geografis memiliki kedekatan dengan kawasan Asia, tentunya dinamika hubungan internasional Australia tidak dapat terlepas dari pengaruh kawasan tersebut khususnya di Asia Tenggara dan Asia Timur. Akan tetapi Australia juga memiliki pengalaman historis dengan bangsa Barat. Hal ini yang akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Australia.

Pada masa pemerintahan koalisi PM Howard kebijakan luar negeri Australia terhadap Asia sempat mengalami ketidakjelasan akibat kurangnya komitmen dalam mengimplementasikannya serta adanya revitalisasi ikatan tradisional sehingga menimbulkan kemunduran hubungan ekonomi-pertahanan dengan kawasan Asia. Namun akhirnya para pembuat keputusan melakukan upaya reorientasi Asian-policy di dalam prioritas dan pendekatan kebijakan luar negerinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa referendum dilaksanakan pada bulan November 1999, saat atau periode di mana partai yang berkuasa adalah Partai Koalisi Liberal yang dipimpin oleh PM Howard yang sedang berada pada masa puncak popularitasnya karena kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. John Howard pada masa itu sangat mengundang simpati masyarakat Australia, sehingga masyarakat Australia lebih cenderung mendukung kelompok anti-republik atau pro-monarki, yang juga diisi oleh Howard sendiri sebagai salah satu tokoh kuncinya. Selanjutnya adalah mengenai kesalahan prediksi pasca hasil Konvensi Konstitusi Puncak. 152 delegasi yang dikirim untuk menghadiri konvensi kemudian dinilai sebagai representasi riil masyarakat Australia. Apalagi hasil yang diperoleh

pasca Konvensi sangat menguntungkan kaum republikan. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan bagi kaum republikan sendiri karena merasa telah mengantongi kemenangan 73 delegasi (lebih dari separuh) dari hasil Konvensi.

Berbagai Faktor yang bisa saja merusak hasil seperti faktor pertama kemudian menjadi terabaikan, terakhir adalah masih besarnya pengaruh kaum konservatif dan pro-monarki di Australia pada saat itu. Kaum konservatif pada umumnya menduduki status yang cukup terpandang dalam stratifikasi sosial masyarakat Australia. Tokoh-tokoh konservatif inilah yang termasuk pendukung loyal monarki di Australia. Mereka secara emosional memiliki hubungan yang dekat dengan Kerajaan Inggris, karena dedikasi dan loyalitasnya kepada Ratu. Tidak sedikit dari mereka malah yang diberi gelar kehormatan kebangsawanank Inggris yang prestisius oleh Ratu.

Mereka tentu tidak menginginkan gelar tersebut menjadi tidak bermakna apa-apa dengan membiarkan Australia berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Begitupula dengan berkuasanya Partai Koalisi, kemudian memberikan peran dan posisi - posisi sentral dan strategis kepada tokoh -tokoh konservatif dan pro-monarki di dalam birokrasi dan pemerintahan Australia. Hal ini berdampak luas karena karakter dan faktor ketokohan mereka yang kemudian menanjak. Faktor-faktor kegagalan kaum republikan seperti yang tersebut di atas kemudian menjadi bukti akan masih banyaknya masalah yang harus dibenahi sebelum benar-benar terwujudnya negara Republik Australia.

Bahkan di kalangan kaum republikan sendiri sebagaimana telah dijelaskan mendesak pemerintah Liberal untuk dilaksankannya Konvensi. Dalam konvensi itu sendiri, kaum republic ternyata belum mempunyai gambaran yang jelas mengenai hal atau konsep kepresidenan yang akan diterapkan di Australia. Hal yang seharusnya sudah matang pada tingkatan mereka sendiri yang tinggal dipaparkan di forum atau Konvensi tersebut. Akan tetapi, barulah di dalam konvensi itu muncul berbagai macam model pemilihan presiden yang ditawarkan.

Setelah itu, dibentuk suatu dewan yang anggotanya terdiri atas orang-orang atau tokoh-tokoh terkemuka yang akan menyeleksi nama-nama tersebut yang selanjutnya diajukan ke parlemen. Calon yang memperoleh suara mayoritas dua pertiga, baik itu di House of Representative maupun di Senat, akan menjadi presiden atau kepala negara yang terpilih. Alternatif lain adalah calon dipilih langsung oleh rakyat australia dalam sebuah mekanisme Pemilihan Kepala Negara. Belum lagi perdebatan mengenai calon diajukan untuk dicalonkan atau menggajukan diri.

Faktor ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah berkuasa pimpinan Perdana Menteri John Howard dengan “memanipulasi” tujuan referendum yang awalnya hanya ditargetkan untuk mengetahui keinginan masyarakat Australia terhadap negara republik, kemudian meluas dengan dimasukkannya daftar pertanyaan mengenai model pemilihan kepala negara yang pada dasarnya belum disepakati dalam Konvensi, kemudian dimasukkan dalam referendum. Hal ini kemudian menyebabkan beralihnya simpati masyarakat yang sebelumnya pro republik, karena

dinilai belum matang secara konseptual. Pada tahun 2001 Australia akan menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain sejumlah 1,725 juta dollar Australia. Indonesia akan menerima kira-kira 7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah 121,5 juta dollar, melalui Program Kerjasama Pembangunan.

Australia merupakan negara pemberi donor terbesar kelima kepada Indonesia. Australia telah menyumbang 1.5% sampai 6% dana bantuan luar negeri Indonesia. Tujuan bantuan Australia adalah pengurangan kemiskinan dengan bantuan yang melalui dua aliran:

1. memperbaiki Pemerintahan termasuk administrasi pemerintah, lembaga perbankan, keuangan dan keadilan.
2. pengembangan sumber daya manusia masyarakat yang miskin dengan memperbaiki pendidikan.
3. kesehatan, khususnya ibu dan anak serta pengendalian HIV/AIDS dan penyediaan air minum.

Banyak sumbangan Australia yang diarahkan ke Indonesia bagian timur, terutama ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya sebab daerah-daerah ini merupakan daerah yang paling miskin dan paling ketinggalan di Indonesia. Kebanyakan bantuan Australia berbentuk program pendidikan dan pelatihan. Dalam sektor pendidikan di Indonesia, Australia menyediakan program beasiswa yang terbesar.

Pada tahun 1996 Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara.

Kedua negara menyepakati bahwa:

1. Para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan.
2. Mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama.
3. Mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil.
4. Bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan.
5. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 1996.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap komitmen internasional yang ada pada kedua negara. Perjanjian itu juga didasarkan atas kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas kawasan bagi semua negara. Kebijakan luar negeri di bawah John Howard merupakan refleksi menguatnya kekuatan konservatif di Australia tetapi sebenarnya lebih pada lahirnya kebijakan yang bertumpu pada pragmatisme. Kebijakan itu akan cepat berubah

tergantung pada kepentingan nasional dan keinginan konstituen di dalam negeri. Memang dalam beberapa hal posisi Indonesia tetap dipandang penting. Indonesia wilayah terdekat Australia di mana lebih dari separuh ekspor Australia menggunakan wilayah Indonesia dan Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara serta merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Stabilitas Asia Tenggara sangat tergantung dengan Indonesia.

Pada saat-saat tertentu kepentingan Indonesia akan dikorbankan terutama apabila menyangkut persoalan kepentingan nasional Australia. Hubungan internasional sehingga Indonesia tidak perlu terkejut. Apabila mau belajar dari konsep budaya Indonesia. Hubungan baik yang bersifat permanen antara Australia dan Asia (Indonesia) bisa terwujud. Ini akan terjadi apabila hubungan kedua negara tersebut lebih banyak dilandasi oleh pendekatan budaya dari pada politis.